



KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

<http://kliping.dpr.go.id>

Judul	: Menkeu Tak Respons Usul Fahri
Tanggal	: Kamis, 22 Agustus 2019
Surat Kabar	: Indo Pos
Halaman	: 2

Menkeu Tak Respons Usul Fahri

JAKARTA-Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengusulkan perubahan terhadap pengelolaan keuangan di lembaga legislatif. Dari yang semula diatur melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) agar dikelola sendiri oleh DPR. Sehingga, DPR menjadi badan yang lebih independen.

Fahri menyebutkan, permintaan tersebut bukan tanpa alasan. Menurutnya, DPR kini memiliki kewajiban mengawasi kinerja pemerintah, termasuk Kemenkeu. Tapi, pengawasan justru menggunakan anggaran yang dikelola pemerintah.

"Jadi, DPR harus memiliki sistem keuangan sendiri," tuturnya dalam Seminar Nasional RAPBN 2020 di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (21/8).

Dia menambahkan, DPR juga sebaiknya memiliki badan pengurus keuangan tersendiri. Ia mencontohkan Amerika Serikat (AS) yang kini memiliki badan pengurus keuangan legislatif, yakni Congressional Budget Office (CBO).

Apabila keuangan legislatif terus dipegang Kementerian Keuangan, Fahri cemas DPR akan dinilai sebagai sebuah badan yang tidak independen. Di sisi lain, keuangan DPR yang dipegang Kemenkeu berpotensi mengganggu fungsi pengawasan terhadap pemerintah.

Menurut Fahri, Indonesia mengusung sistem demokrasi yang memungkinkan DPR memiliki uang sendiri. "Tidak bisa masuk dalam sistem APBN dan tunduk pada yang mau diperiksa," tukasnya.



ANTARA FOTO/INDRIANTO EKO SUWARSO/HP

Sementara, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati enggan merespons permintaan tersebut. Dia hanya menyampaikan lima fokus kebijakan yang digunakan dalam RAPBN 2020. Lima fokus kebijakan itu juga merupakan diagnosa dari masalah eksternal dan internal ekonomi yang terjadi.

"Fokus kebijakan yang sudah disampaikan presiden adalah lima hal. Terkait erat dengan diagnosa dari masalah eksternal dan internal," ujarnya dilokasi yang sama.

Pertama, kata Sri Mulyani, yakni kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) terutama dikaitkan dengan keinginan program pemerintah menangani permasalahan SDM, baik dari sisi pendidikan, kemampuan, mobilitas dan kemampuan menciptakan inovasi dan kreativitas yang berujung pada produktivitas perekonomian.

Kedua, lanjutnya, yakni fokus Infrastruktur. Fokus Infrastruktur berpengaruh ke faktor fundamental dari sisi efisiensi dan competitiveness. Ketiga, perlindungan sosial. Fokus kebijakan ini diharapkan pertumbuhan ekonomi tidak hanya tumbuh tinggi tetapi juga ketimpangan dapat diatasi.

"Ini karena keinginan kita untuk tidak sekadar tumbuh tinggi ekonominya, tapi juga berkualitas juga menyelesaikan masalah ketimpangan. Terutama di saat demografi kita masih muda dan antisipasi bahwa bonus demografi tidak akan terjadi selamanya," jelasnya.

Keempat, desentralisasi fiskal. Dimana sebagian besar belanja negara adalah transfer ke daerah dalam berbagai bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Otonomi Khusus Dana Desa. "Itu semua memiliki kinerja dan tujuan yang perlu terus diperbaiki," ujar Sri Mulyani.

Terakhir, yakni mengantisipasi ketidakpastian baik berasal dari global seperti terjadi down term maupun dalam negeri kalau terjadi ketidakpastian akibat bencana alam.

Diketahui, dalam RAPBN 2020, anggaran untuk DPR ditetapkan sebesar Rp 4,28 triliun yang dibagi untuk empat program DPR. Yaitu, Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Jenderal DPR, Program Dukungan Keahlian Fungsi Dewan, Program Penguatan Kelembagaan DPR dan Program Pelaksanaan Fungsi DPR. (aen)